

Implementasi Program Petani Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Reny July Rivany, Ananta Prathama

Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

renyrivany23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Independent Farmer Program in Sumberrejo Sub-district, Bojonegoro Regency, a flagship priority program of the local government. This program is governed by Regent Regulation Number 43 of 2020 concerning the Second Amendment to Regent Regulation Number 20 of 2019, which amends Regent Regulation Number 48 of 2018 on the Independent Farmer Program. The program seeks to improve farmers' welfare through empowerment and access to agricultural resources. The study's findings indicate that the program faces challenges, such as low farmer awareness and the suboptimal implementation of several initiatives. The research employs a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews, field observations, and document analysis. Recommendations include enhancing farmer outreach and training, as well as strengthening program monitoring and evaluation to ensure effectiveness and sustainability.

Keywords: Author Guidelines; Journal Al-Kharaj; Article Templates

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Program Petani Mandiri di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan program prioritas unggulan daerah. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019, yang mengubah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan dan akses terhadap sumber daya pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran petani dan beberapa program yang tidak berjalan maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi petani serta penguatan pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Kata kunci: Program Petani Mandiri, implementasi, kesejahteraan petani, Bojonegoro, kebijakan daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kondisi geografis yang sangat mendukung untuk bercocok tanam, memiliki tanah yang subur dan iklim tropis yang memungkinkan pertanian sepanjang tahun. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, menjadikan pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

Berbagai komoditas seperti padi, jagung, kopi, kakao, dan kelapa sawit merupakan produk unggulan yang dihasilkan. Selain itu, sektor pertanian juga memainkan peran penting dalam ketahanan pangan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Dengan potensi alam yang melimpah, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk terus mengembangkan sektor pertaniannya dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

Sektor pertanian di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan signifikan, salah satunya adalah kurangnya minat dari kelompok muda untuk terjun ke bidang ini, yang dianggap kurang menjanjikan dibanding sektor lain. Banyak generasi muda yang lebih memilih bekerja di perkotaan dengan harapan memperoleh pekerjaan yang dianggap lebih modern dan berpenghasilan lebih tinggi. Sebagai petani, mereka harus menghadapi banyak masalah mulai dari sektor budidaya, sarana produksi, dan lainnya, serta *input* yang diperlukan untuk menghasilkan *output* tanaman seperti benih, pupuk, dan pestisida (Tanjung et al., n.d.)

Bojonegoro merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian yang luas. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan kemandirian kepada petani di daerah Bojonegoro melakukan kebijakan dengan meluncurkan Program Petani Mandiri. Program ini berisikan program bantuan modal, akses pelatihan serta usaha pengembangan usaha tani, jaminan pembelian hasil pertanian serta asuransi gagal panen, dan peternakan, serta beasiswa.

Dari langkah pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kesejahteraan petani dapat dirumuskan sebagai berikut ini “Bagaimana pelaksanaan program petani mandiri dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Dari rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan dalam penelitian yaitu untuk memahami, menganalisis dan mendeskripsikan aspek-aspek terkait implementasi program petani mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menggunakan data dalam bentuk kata-kata dan gambar untuk memberikan deskripsi mendalam tentang suatu fenomena atau kejadian daripada angka-angka. Menurut (Moleong, 2021) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yaitu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya.

Teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut (Moleong, 2021) keabsahan data merupakan unsur dari pengetahuan penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data selain digunakan untuk

menyanggah tuduhan penelitian yang dikatakan tidak ilmiah juga sebagai upaya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Keabsahan data meliputi derajat kepercayaan (*credibility*), keterahlian (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Petani Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi sektor pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di dalam negeri. Sebagian besar penduduk Indonesia menjalani profesi sebagai petani karena luasnya lahan yang tersedia. Pertanian memainkan peran yang sangat signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta memajukan sektor sosial, ekonomi, dan perdagangan. Selain itu, sektor pertanian memiliki banyak manfaat, termasuk menjaga sumber daya alam, memberikan kehidupan dan penghidupan, dan menciptakan lapangan pekerjaan (Isbah et al., n.d.).

Sebagai petani, mereka harus menghadapi banyak masalah mulai dari sektor budidaya, sarana produksi, dan lainnya, serta *input* yang diperlukan untuk menghasilkan *output* tanaman seperti benih, pupuk, dan pestisida (Tanjung et al., n.d.). Rendahnya tingkat kesejahteraan yang di dapatkan petani tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah karena sektor pertanian menjadi salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan ekonomi dan pemerintahan. Upaya dalam meningkatkan produksi sub sektor tanaman pangan dengan cara mempertahankan luas lahan tanam yang ada dan tidak melakukan alih fungsi terhadap lahan tanaman, meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan menjaga stabilitas harga (Dahiri, 2022).

Keadaan Geografis Bojonegoro utamanya didominasi oleh sektor pertanian karena ciri tanahnya yang berbukit di sisi selatan (Gunung Kapur Selatan) dan utara (Gunung Kapur Utara) yang terjepit oleh dataran rendah yang mengikuti jalur sungai Bengawan Solo. Situs web bojonegorokab.go.id menjelaskan bahwa elevasi tanah di Kabupaten Bojonegoro relatif rendah, berkisar antara 25 hingga 500 meter di atas permukaan laut, dan kecuraman rata-ratanya kurang dari 2%. Hal ini menyebabkan Kabupaten Bojonegoro memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, kondisi ini sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Selain itu, karena sebagian besar wilayah Bojonegoro dilalui oleh aliran sungai Bengawan Solo, ini memberikan dampak positif yang besar terhadap sektor pertanian.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam usaha untuk memastikan kemandirian dan kesejahteraan petani di wilayahnya, telah menginisiasi Program Petani Mandiri. Inisiatif terbaru ini merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Menghadapi

tantangan seperti fluktuasi harga, kegagalan panen, risiko bencana alam, dampak globalisasi, dan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadopsi undang-undang ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kondisi sosio-ekonomi petani (Beji et al., n.d.)

Petani adalah prioritas utama Bupati Anna Mu'awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto untuk program Petani Mandiri. Petani dapat menerima bantuan berupa hibah modal dalam bentuk barang kebutuhan pertanian, seperti pupuk, bibit, alat, dan mesin pertanian. Secara keseluruhan, program petani mandiri meningkatkan akses petani terhadap modal dan teknologi, memberikan jaminan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Petani yang ingin mendapatkan manfaat dari adanya Program Petani Mandiri (PPM) harus terdaftar sebagai pemegang Kartu Petani Mandiri (KPM). Kartu ini diberikan kepada keluarga petani dengan memenuhi persyaratan undang-undang dan digunakan sebagai identitas dan penanda identitas. Selain itu, kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan akses ke fasilitas Program

Keuntungan dari Program Petani Mandiri ini dapat dinikmati dengan memenuhi sejumlah syarat. Calon penerima harus terdaftar sebagai anggota sebuah Kelompok Tani di wilayah setempat, memiliki atau mengantongi Kartu Petani Mandiri (KPM), calon penerima harus menjadi kepala keluarga yang tidak pernah menerima bantuan secara terus-menerus dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan bersedia menandatangani surat pernyataan yang menegaskan kesiapan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Petani yang belum memiliki Kartu Petani Mandiri untuk menerima bantuan dari program ini dapat meminta pembuatan KPM dengan memenuhi kriteria berikut: a) Kepala keluarga petani yang memiliki tanah dan/atau yang menanam tanaman padi, buah-buahan, dan sejenisnya; b) Kepala keluarga petani yang memiliki tanah lebih dari 2 hektar; dan c) Kepala keluarga petani yang tinggal di wilayah tersebut dengan menyertakan Surat Pernyataan Kepala Keluarga Petani Mandiri. g) Status kepemilikan, pengolahan, dan luas tanaman yang dikelola.

Program ini ditujukan kepada petani Bojonegoro, baik yang memiliki tanah atau menggarap sawah; ini mencakup petani padi, sayur, sawah, dan ladang. Petani akan menjadi lebih produktif dan mandiri, dan produk pertanian akan menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut ini merupakan data pemegang Kartu Petani Mandiri di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro:

Tabel 1. Daftar Pemegang Kartu Petani Mandiri di Kecamatan Sumberrejo

No.	Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Petani	Luas Lahan (Ha)	Luas Tanam (Ha)
1	Sambongrejo	6	716	290	870
2	Margoagung	5	507	197	591
3	Tulungrejo	4	454	172.24	516.72

4	Prayungan	3	295	153.29	459.87
5	Mlinjeng	4	599	281.58	844.74
6	Wotan	4	573	264.91	794.73
7	Sumberharjo	7	893	480	960
8	Banjarejo	3	606	222.31	444.62
9	Tlogohaji	6	1200	551.23	1653.69
10	Sendangagung	2	314	163.14	489.42
11	Kedungrejo	3	462	262.8	788.4
12	Ngampal	6	1158	496	1488
13	Talun	2	172	66.39	199.17
14	Bogangin	2	188	74.79	224.37
15	Karangdowo	4	587	248.812	854.436
16	Pejambon	3	253	117.09	351.27
17	Deru	3	316	168.5	505.5
18	Pekuwon	4	616	320	960
19	Sumuragung	5	418	172.05	516.15
20	Sumberrejo	3	243	127.3	381.9
21	Jatigede	2	403	150.99	452.97
22	Kayulemah	8	587	333.23	999.69
23	Mejuwet	2	187	79	237
24	Butoh	5	475	201	603
25	Karangdinoyo	5	642	283	849
26	Teleng	2	436	232.8	582.245

Sumber: BPP Kecamatan Sumberrejo, 2024

Dalam pelaksanaan program petani mandiri di Kecamatan Sumberrejo dapat diukur dengan teori implementasi program milik David C.Korten antara lain:

1. Program

Dalam elemen pertama, yaitu adanya inisiatif program, seperti yang dijelaskan oleh Korten dan dikutip dalam penelitian Nafa Tasya (2023), keterkaitan antara program dan kebutuhan kelompok sasarannya merupakan faktor yang sangat krusial. Dalam usahanya untuk meningkatkan kemandirian petani, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Program Petani Mandiri. Program ini menawarkan akses ke sumber daya dan pelatihan kepada petani.

Aturan pelaksanaan Program Petani Mandiri dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2020 yang mengubah Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2019 yang juga telah mengubah Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri. Berdasarkan temuan dari penelitian lapangan, misi dari inisiatif petani mandiri telah diterangkan secara detail kepada anggota sasaran oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penjelasan ini diberikan untuk mendorong para petani agar mendaftarkan diri sebagai pemilik kartu petani mandiri, sehingga mereka bisa memperoleh manfaat program, seperti bantuan

gratis pupuk dan benih, pelatihan dan pembangunan usaha tani, kesempatan beasiswa, perlindungan pembelian oleh BUMDes, dan jaminan asuransi untuk kegagalan panen.

Pada pemanfaatan program setiap aspek diampu oleh Dinas terkait sesuai dengan tanggung jawab. Pada bantuan hibah pupuk dan benih sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021, yang merupakan revisi dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberian hibah, dibawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pada manfaat Asuransi Gagal panen sesuai dengan m Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 dibawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Manfaat lainnya dari program petani mandiri seperti pemberian beasiswa kepada keluarga pemegang KPM berada dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan. Manfaat pelatihan dan pengembangan usaha tani berada di bawah tanggung jawab Dinas Perindustrian, sedangkan untuk pembelian jaminan panen dilakukan oleh BUMDes, namun hingga saat ini belum ada klaim/pembelian hasil panen melalui BUMDes.

Dengan merujuk pada tindakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang memiliki tanggung jawab langsung di sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro, penerapan program petani mandiri telah terbukti sesuai dan didukung oleh studi yang dilakukan oleh Deybi Debora Palit dan rekan-rekannya pada tahun 2021. Mereka menyimpulkan bahwa apabila program tidak disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka program tersebut tidak akan memberikan keuntungan dan tidak akan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.

2. Pelaksanaan program

Salah satu indikator dalam teori Implementasi David C. Korten adalah penegakan pelaksanaan program. Menurut Korten, kesiapan antara program dan badan yang menjalankannya, yakni kesesuaian antara tanggung jawab yang diinginkan oleh program dengan kemampuan badan yang melaksanakan. Ini berarti bahwa keberhasilan suatu program tergantung pada kemampuan badan yang melaksanakan untuk menjalankan tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan menunjukkan bahwa, pelaksana program petani mandiri tidak terlepas dari peran organisasi pelaksana yang bertanggung jawab sesuai dengan satuan kerjanya. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab dalam bantuan hibah dan pupuk, asuransi usaha tanam padi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus memastikan bahwa para petani sudah tergabung dalam kelompok tani dan menerima Kartu Petani Mandiri. pada penyaluran dana hibah yang tidak bisa terus menerus oleh satu kelompok dari tahun ke tahun maka harus dilakukan pendampingan kepada para kelompok tani bahwa hibah pupuk dan benih ini diberikan secara bergantian. Selain itu pada penyaluran hibah pupuk dan benih

Dinas Pertanian sebagai pengawas pelaksanaan manfaat program memiliki kepanjangan tangan yaitu BPP (Badan Penyuluh Pertanian) di kecamatan yang berfungsi untuk menjembatani antara Dinas Ketahanan Pangan dengan kelompok tani.

Arah respons para pelaksana program yaitu Dinas yang bertanggung jawab pada setiap elemen dalam pelaksanaan program petani mandiri masih belum berjalan dengan maksimal. Hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat program petani mandiri yang belum dirasakan oleh kelompok petani di Kecamatan Sumberrejo. Pada jaminan pembelian hasil pertanian yang dilakukan oleh BUMDes hingga saat ini masih belum terlaksana. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas yang diharuskan oleh program, maka organisasi tersebut tidak akan mampu menghasilkan *output* program dengan tepat.

3. Kelompok sasaran

Model kesesuaian program pada elemen kelompok sasaran menurut David C. Korten adalah kecocokan antara kelompok sasaran dan pelaksana. Kesesuaian 91 ini dianggap terpenuhi apabila kelompok sasaran mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pelaksana program dalam mencapai hasil program yang diinginkan (Dwi Noerbella, 2022).

Pertama tepat program, program yang ada telah memuat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro telah memberikan suatu perubahan pada petani khususnya di Kecamatan Sumberrejo. Dengan adanya program petani mandiri, petani merasa terbantu dengan terdaptarnya para petani dalam pemegang kartu mandiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Jones dikutip oleh Rohman dalam (Andani & Setyowati, 2019) program merupakan upaya berwenang untuk tercapainya kegiatan implementasi.

Kedua tepat pelaksanaan, implementasi sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan program hibah bantuan pupuk dan benih, asuransi usaha tanam padi, pelatihan terkait dengan pupuk sudah baik dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan, para petani sudah banyak merasakan terkait dengan manfaatnya seperti yang dijelaskan pada gambaran umum tentang penerima bantuan hibah pupuk dan benih di Kecamatan Sumberrejo. Manfaat beasiswa juga sudah dirasakan oleh keluarga petani terkait dengan bantuan beasiswa strata 1, Dinas Pendidikan terus berupaya untuk melakukan pengawasan dengan cara mengumpulkan data-data yang valid setiap tahunnya untuk proses pencairan. Pada jaminan pembelian hasil pertanian oleh BUMDes masih belum berjalan dan banyak kelompok tani yang tidak mengetahui adanya manfaat program ini.

Ketiga yaitu tepat sasaran. Target sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dimana sasaran program ini adalah para petani. Petani harus tergabung dalam kelompok tani

yang ada di wilayahnya dan mendaftarkan diri sebagai pemegang kartu petani mandiri dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani.

Dengan beberapa indikator yang terdapat dalam teori David C. Korten Pelaksanaan Program Petani Mandiri ini sudah sesuai dengan kelompok sasaran. Petani yang tergabung dalam kelompok tani di wilayahnya dan sudah terdaftar sebagai pemegang Kartu Petani Mandiri. hasil wawancara yang dilakukan oleh 10 orang yang berada di Kecamatan Sumberrejo semua sudah menjadi pemegang KPM dan sudah merasakan manfaat dari Program Petani Mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Petani Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan Model Kesesuaian Program menurut David C. Korten telah berjalan dengan baik. Menurut Korten dalam (Bahri et al., 2020) dengan menggunakan tiga elemen, yaitu Program, Pelaksana Program dan Kelompok Sasaran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Program

Kejelasan tujuan dari program petani mandiri telah terlaksana dengan baik dan disampaikan kepada kelompok sasaran melalui sosialisasi program petani mandiri 94 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Melalui sosialisasi ini, para masyarakat yang bekerja sebagai petani diberi materi terkait dengan fungsi KPM, manfaat dari adanya KPM, dan cara mendapatkan KPM sebagai syarat untuk memperoleh manfaat PPM

2. Pelaksana Program

Sebuah program kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika organisasi pelaksana mampu menjalankan tugas-tugas yang diperlukan untuk mengimplementasikan program tersebut dengan efektif. Pada program petani mandiri terdapat beberapa Dinas yang bertanggung jawab pada setiap manfaat program seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan BUMDDesa. Para organisasi pelaksana memiliki pemahaman dan kemampuan dasar didalam penanganan Program Petani Mandiri yang dilakukan melalui Sosialisasi terkait dengan manfaat program, pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan petani.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada pelaksanaan program petani ini berfokus pada masyarakat yang bekerja sebagai petani dan telah mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok tani dan memiliki Kartu Petani Mandiri. Penerima manfaat program petani mandiri telah disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan program yang membantu Dinas terkait sesuai dengan karakteristik dan tanggung jawabnya. Masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan program petani mandiri, yaitu pada kesadaran masyarakat terkait dengan kewajiban membayar

premi untuk 95 asuransi gagal panen, selain itu kemampuan petani pada teknologi sehingga dalam pengajuan proposal masih terdapat kendala.

SARAN

1. Pada pelaksanaan program, tambahkan program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis pertanian tetapi juga manajemen keuangan dan pemasaran hasil pertanian. Ini akan membantu petani menjadi lebih mandiri dan mampu mengelola usaha taninya dengan lebih baik. Seperti melakukan inovasi terkait dengan Integrasikan teknologi modern dalam program, seperti penggunaan aplikasi pertanian digital untuk manajemen lahan, pemantauan cuaca, dan akses ke pasar. Ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.
2. Perlu adanya koordinasi dan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan program petani mandiri, peran BUMDesa dalam memberikan penyuluhan dan Dinas perindustrian dalam pelatihan pengembangan usaha petani lainnya diperlukan untuk dapat meningkatkan kemampuan petani di berbagai bidang
3. Perlu adanya pendekatan personal dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program. Sosialisasi harus mencakup informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai manfaat dan cara partisipasi dalam program. Pastikan informasi dan layanan terkait program mudah diakses oleh semua petani, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan lapangan, penggunaan media sosial, dan pembentukan kelompok petani yang solid.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, A. T. V., & Setyowati, E. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. In *dan Fadillah Amin/ JIAP* (Vol. 5, Issue 3).
- Bahri, S., Bedjo Sujanto, Mp., & Madhakomala, Mp. R. (2020). *MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU*. www.penerbitwidina.com
- Beji, D., Kedewan, K., Bojonegoro, K., & Armanto, D. (n.d.). *Efektivitas Program Petani Mandiri (PPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani di*.
- Dahiri. (2022). *DISPARITAS DAN UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI*. *Budget*, 7, 1–20.
- Dwi Noerbella. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI LITERASI DAN NUMERASI PESERTA DIDIK*. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(2), 480–489. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2087>

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 9 (2024) 4249 - 4258 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i9.2746

Isbah, U., Yani, R., Program, I., Ekonomi, S., Jurusan, P., & Ekonomi, I. (n.d.). *ANALISIS PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN DAN KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI RIAU.*

Moleong, J. L. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.

Tanjung, A. F., Rini, I., & Lubis, S. N. (n.d.). *STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU.*